

ANTARA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN DEGRADASI LINGKUNGAN

Oleh:

M. Firmansyah¹⁾, Diah Setyorini Gunawan²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

This paper describes the linkage between economic development and environmental degradation, while economics growth being the center of national economic development indicators. The degradation of natural resources is not the unique attribute of advanced Western industrial economic. But, it happens on Eastern economics bloc and the low growth economics countries also. The searching of win-win solution is tried by economic agents – government, entrepreneur, and societies, to create the balancing decision that stimulate all advantages on development policy application.

Keywords: *economic growth, environmental degradation, economic agents*

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi berbicara tentang tabiat manusia yang umum dilakukan dalam tindakannya menuju pencapaian kemakmuran. Tabiat manusia menjadi obyek pengetahuan ekonomi (Hatta, 1994: 89). Setiap manusia mempunyai kebutuhan hidup yang harus terpenuhi terus-menerus dan sewaktu-waktu, namun keinginan ini terkendala oleh alat pemenuh yang cenderung terbatas. Oleh karena itu, lahirlah motif ekonomi yang mengkombinasikan antara kebutuhan dan ketersediaan alat yang relatif terbatas tersebut. Apapun jalannya hasrat setiap orang tetap ingin terpenuhi, motif ekonomi memberi ruang pencapaiannya dengan menganggap kegiatan ekonomi haruslah mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan membuang tenaga (modal) yang sedikit-dikitnya. Artinya dengan modal yang sedikitpun manusia harus tetap terpenuhi.

Kemajuan teknologi telah menyulap masyarakat untuk bersifat lebih konsumtif, hasrat memuaskan kebutuhan memang benar-benar tidak perlu biaya mahal, persaingan memaksa produsen lebih memanjakan konsumen dengan biaya yang relatif murah dan terkadang irasional. Industrialisasi tumbuh dengan pesat sehingga pengangguran banyak terserap dunia kerja. Negarapun ikut merasakan efeknya, yaitu dengan membaiknya performa indikator ekonomi secara mikro dan makro. Daya beli masyarakat yang meningkat, semakin menguatkan pandangan betapa konsumtifnya masyarakat kita.

Paham positif ekonomi menggarisbawahi bahwa kemajuan ekonomi suatu negara tergambar dari pertumbuhan ekonominya, tanpa melihat secara normatif apa yang harus dilakukan untuk mengimbangi efek negatif dari konsep tersebut (Field dan Field, 2006) dan kemajuan tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan yang didesain dan

direncanakan pemerintah yang mengusung konsep neo-kapitalis global, pembangunan nasional selama lebih identik dengan pertumbuhan ekonomi maka jangan bermimpi untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Indikator kesuksesan perekonomian suatu negara tercermin dari tingginya PDB (Produk Domestik Bruto), meningkatnya laju aliran investasi ke dalam negeri, tingkat inflasi dan bunga yang stabil dan akhirnya berimplikasi pada meluasnya penciptaan lapangan kerja baru. Diharapkan kondisi ini akan meningkatkan hasrat mengonsumsi masyarakat (daya beli meningkat) yang akhirnya bermuara pada peningkatan PDB dan pemerataan pedapatan pun tercapai. Sayangnya filosofis dan harapan tersebut meleset 180 derajat, konsep pertumbuhan ekonomi ternyata memunculkan konglomerasi-konglomerasi baru yang terisolir hubungannya dengan masyarakat miskin. Ketimpangan pun tidak dapat terelakkan lagi.

Dengan dalih mempercepat proses pembangunan nasional dalam upaya mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, negara berkembang melakukan berbagai manuver dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa melakukan pengkajian lebih lanjut akan perubahan transformasi besar-besaran sistem ekonomi yang begitu cepat. Semua sektor diarahkan untuk kesuksesan sektor industri. Hasrat ini nyatanya tidak memperdulikan berbagai efek samping berupa tingkat eksternalitas negatif yang meningkat dan memburuknya kondisi riil sosial budaya yang timbul dari usaha-usaha tersebut, khususnya kerusakan moral dan kondisi degradasi lingkungan yang semakin akut. Semua ini bersumber dari anggapan bahwa alam merupakan satu-satunya sumber modal

yang mudah dieksploitasi dan menjanjikan pendapatan serta kesejahteraan bagi masyarakat dengan cepat. Kita lupa bahwa semua itu justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih rumit dan kompleks, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Paling tidak menyebabkan makin merenggangnya hubungan masyarakat dengan alam.

Bentuk hubungan manusia dengan lingkungan telah melalui beberapa fase, dimulai dari jaman primitif dimana manusia hidup bersimbiosis dengan alam, kemudian disusul dengan periode penguasaan yang terus bertambah atas alam hingga masa industrialisasi, dan pada puncaknya adalah pertumbuhan secara cepat dengan pola-pola padat materi pada abad 20-an yang bertentangan dengan pelestarian sumber-sumber alam dalam berbagai cara (Siregar: 2004). Permasalahan lingkungan telah menjadi pembahasan dan perhatian dunia yang sangat serius. Polusi yang semakin meluas menjadi ancaman nyata untuk negara-negara industri, sementara kualitas hidup hingga saat ini diukur hampir semata-mata dari pertumbuhan output materi semata.

Pembangunan nasional secara khusus seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu *melindungi segenap bangsa indonesia (tanah tumpah darah Indonesia), memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menjaga perdamaian dunia* dan seterusnya. Melindungi bukan semata-mata berjuang melawan kolonialisme, tetapi lebih jauh melindungi dan melestarikan alam yang terkandung dalam ibu pertiwi ini sendiri.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan sumber yang penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan lingkungan merupakan tempat dalam arti luas bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya (BAPPEDA DKI Jakarta, 2001). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang hanya berorientasi ekonomi hanya membawa efek positif secara ekonomi tetapi menimbulkan efek negative bagi kelangsungan kehidupan umat manusia.

Meraih kesejahteraan bukan hanya sekedar berjuang memberantas kemiskinan dengan jalan pintas dan cepat yaitu modal alam dieksploitasi secara besar-besaran. Kita tidak sadar bahwa menurunnya kualitas alam akan menambah panjang garis kemiskinan yang ditimbulkan dalam proses perjalanan pembangunan di masa yang akan datang. Kita-pun melupakan bahwa sesungguhnya kecerdasan suatu bangsa akan tercipta lewat pemberdayaan yang optimal dan terus menerus di mana manusia yang

menjadi objek pembangunan itu sendiri dan harus bersahabat dengan alam.

Dalam mencermati pembangunan yang semakin melupakan kelestarian alam, perlu adanya pengkajian lebih lanjut akan sejauh mana pemanfaatan lingkungan sebagai modal alam secara efisien, bagaimana akibat yang ditimbulkan akibat degradasi lingkungan, bagaimana konsep kelestarian lingkungan yang dikaitkan dengan kebijakan atau regulasi yang tepat guna meminimalisir terjadinya degradasi lingkungan dalam wadah pembangunan berkelanjutan.

LINGKUNGAN SEBAGAI MODAL ALAM

Modal alam memberikan kontribusi yang amat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan manusia. Istilah modal alam mencakup fungsi-fungsi penampung, yakni, udara dan air sebagai media penerima bagi polusi yang dihasilkan manusia serta hutan-hutan dan potensi laut menjadi penampung dari polusi yang ditimbulkan industri-industri kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Melindungi fungsi penampung ini adalah merupakan hal yang hakiki bagi kesehatan manusia.

Modal alam yang berkualitas tinggi memberikan kontribusi tidak langsung terhadap kesejahteraan manusia sebagai bagian esensial dari produksi barang dan jasa yang berkesinambungan, juga memberi kontribusi langsung terhadap tingkat kesejahteraan karena masyarakat mendapatkan kenikmatan yang mahal harganya dari lingkungan yang bersih dan murni, hutan-hutan yang telah tua umurnya, dan danau serta sungai tempat kita dapat berenang dan memancing ikan. Berbagai kesempatan telah diperlihatkan pentingnya modal manusia, alam dan lingkungan fisik bagi pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Karena substitusi yang tidak sempurna, aset-aset ini perlu untuk ditumbuh kembangkan dengan tingkat yang tidak terdistorsi atau cukup seimbang sehingga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pertumbuhan yang terdistorsi atau tidak seimbang secara khusus diisyaratkan dengan akumulasi peningkatan modal fisik yang sangat pesat, akumulasi modal manusia yang lambat, dan penurunan modal alam yang meningkatkan volatilitas pertumbuhan secara tidak proporsional yang justru merugikan kaum miskin. Suatu perekonomian yang membina pertumbuhan yang tidak seimbang kemungkinan besar akan mengalami stagnasi jangka panjang.

Perekonomian yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari sumber alam tidak dapat melestarikan pertumbuhan dengan mengganti akumulasi modal fisik untuk modal alam yang semakin buruk (Lopez, Thomas dan Thomas, 1998). Degradasi lingkungan cenderung paling menyangsakan kaum miskin, yang kerap menggantungkan diri pada sumber daya alam untuk memperoleh pendapatan sehari-hari, sedikit sekali kemungkinan nilai manfaatnya bisa tergantikan dengan aset-aset lain. Dalam jangka panjang, pendekatan pertumbuhan yang menaruh perhatian pada kualitas lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya akan memberikan kontribusi terhadap akumulasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan manusia.

Negara-negara di seluruh dunia telah mengeksploitasi hutan, perikanan, kekayaan pertambangan mereka secara berlebihan, mencemari air serta udara untuk membuka kran dalam mempercepat roda pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Alibi pengambil kebijakan adalah dengan mengatakan bahwa kebijakan mereka semata-mata akan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Padahal banyak modal alam yang dikorbankan melalui penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, serta polusi air dan udara.

KERUGIAN AKIBAT DEGRADASI LINGKUNGAN

Polusi udara dari emisi-emisi industri, gas buang kendaraan bermotor dan bahan bakar yang dibakar di rumah-rumah penduduk telah membunuh lebih dari 2,7 juta orang setiap tahun, terutama karena kerusakan pernapasan, penyakit jantung, paru-paru, serta kanker (UNDP, 1998). Dari mereka yang terkena dampak dan dinyatakan meninggal karena penyakit tersebut diantaranya 2,2 juta adalah kaum miskin pedesaan yang terkena langsung polusi udara dalam ruangan akibat pembakaran bahan bakar tradisional. Polusi udara juga mengurangi hasil ekonomi karena hilangnya hari-hari produktif, untuk lebih memahami besarnya kerugian akibat polusi udara di berbagai bagian dunia ditunjukkan oleh tabel 14.1.

Tabel 14.1 menunjukkan bahwa kebanyakan dampak yang ditimbulkan polusi udara adalah kematian prematur. Ini di akibatkan polusi udara di kawasan Asia Timur dan negara-negara baru merdeka lain yang melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO. Asap-asap pabrik, asap-asap dari aktivitas rumah tangga, asap knalpot kendaraan bermotor yang banyak mengandung karbon dioksida, penggunaan bahan bakar minyak yang mengandung *lead* (timbal), penggunaan CFC (*Cloro-Fluro Carbon*) dan lain sebagainya menjadi pemicu timbulnya polusi udara.

Tabel 14.1. Biaya Kesehatan Tahunan yang Terkait dengan Polusi Udara

Kawasan dan Kota	Dampak	Biaya
Cina: 11 kota besar utama	Biaya-biaya ekonomi mortalitas prematur dan biaya-biaya akibat penyakit.	Lebih dari 20 persen dari pendapatn perkotaan
Asia Timur: Bangkok, Jakarta, Seoul, Kuala Lumpur, Manila	Banyaknya kematian prematur akibat polusi udara diatas batas aman yang ditetapkan oleh WHO.	15.600
Asia Timur: Bankok, Jakarta, Kuala Lumpur.	Biaya ekonomi akibat mortalitas prematur dan biaya-biaya akibat penyakit.	Lebih dari 10 persen pendapatan perkotaan.
Negara-negara yang baru merdeka: Federasi Rusia (Volgogard); Armenia(wilayah-wilayah Perkotaan); Azerbaidzhan(nasional); Kazakhstan(nasional)	Banyaknya kematian prematur akibat polusi udara di atas batas-batas aman yang di tetapkan oleh WHO.	14.458

Sumber: Bank Dunia (1997, 1999 dalam Thomas, 2001)

Tabel 14. 2. Biaya Kesehatan Tahunan yang Terkait dengan Penyakit yang Ditularkan Melalui Air dan Polusi

Kawasan atau Negara	Dampak	Biaya
Vietnam	Kematian bayi yang dapat dihindarkan dengan menyediakan akses untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi.	50.000
Cina	Kematian prematur akibat penyakit yang terkait air seperti diare, hepatitis, dan nematoda intestinal	135.000
Asia Timur	Biaya penyakit yang ditularkan melalui air Kematian prematur.	US\$ 30 milyar per tahun 980-1850
Moldova	Hilangnya hari kerja akibat sakit	2-4 juta pertahun

Sumber: Bank Dunia (1997, 1999 dalam Thomas, 2001).

Untuk mengetahui besarnya biaya tahunan terkait dengan penyakit yang ditularkan melalui air dan polusi dapat dilihat pada tabel 14.2.

Kematian prematur masih mendominasi akibat polusi, baik udara maupun air, ditambah diare, hepatitis dan nematoda intestinal. Masalah ini lebih kepada kurangnya akses mendapatkan air bersih dan sanitasi, seperti yang terjadi di Jakarta, dimana sungai ciliwung yang dijuluki *the longest toilet in the world* (Prabowo, 1983) dari dahulu telah mempunyai manfaat ganda dalam keberlangsungan hidup masyarakat sekitarnya, yaitu dapat sebagai toilet (termasuk di dalamnya mandi cuci kakus), memasak, minum, tempat mandi ternak dan sekaligus pembuangan kotoran ternak, pembuangan sampah, pembuangan limbah industri maupun rumah tangga dan lain sebagainya.

Estimasi baru-baru ini yang dilakukan majalah *DAILY* menyatakan bahwa kematian prematur dan berbagai penyakit akibat resiko kesehatan lingkungan utama bertanggung jawab atas sekitar seperlima dari beban total penyakit di dunia yang sedang berkembang (Murray dan Lopez, 1996 dalam Thomas, 2001). Di antara resiko lingkungan yang utama mencakup pasokan air yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, polusi udara dalam ruangan, polusi udara perkotaan, malaria, dan bahan-bahan serta limbah agro-industri, 14 persen dari seluruh beban penyakit disebabkan oleh pasokan air yang buruk, sanitasi yang tidak memadai dan polusi udara dalam ruangan. Semua itu terutama menyerang kaum perempuan dan anak-anak dalam keluarga miskin (Lovski et al, 1999 dalam Thomas, 2001).

KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM KEBIJAKAN PERTUMBUHAN

Apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat atau lebih lambat menjamin perlindungan atas modal? Pertanyaan ini akan dibuktikan dari berbagai studi empiris dan pandangan dari tim Bank Dunia yang melakukan investigasi terhadap beberapa negara di dunia. Pandangan pentingnya adalah ternyata baik perekonomian yang tumbuh dengan pesat maupun yang lambat sama-sama telah mengalami degradasi lingkungan dengan berbagai macam tingkatannya. Cina merupakan kota ke 15 dari 20 kota yang paling terpolusi di dunia, seperti yang terukur dengan konsentrasi partikel-partikel yang melayang-layang di udara (Bank Dunia, 1995).

Polusi udara yang, khususnya partikel total yang melayang-layang di udara yang tinggi tingkatannya, telah mengakibatkan kematian prematur dan kerusakan kesehatan yang parah di wilayah perkotaan seperti Bangkok, Jakarta, Manila dan sejumlah kota besar di Cina. Negara-negara yang mengalami pertumbuhan pesat dalam konteks reformasi ekonomi pada tahun 1980-an Cina, Korea, Malaysia dan Thailand menyaksikan emisi-emisi karbon dioksida perkapita yang berlipat dua atau tiga kali lipat setelah terjadinya reformasi dan percepatan pertumbuhan tersebut.

Meskipun demikian bukan hanya pertumbuhan pesat yang mengantarkan kepada permasalahan degradasi modal alam. Seperti halnya negara-negara Asia Timur, negara-negara Amerika Latin yang pertumbuhan ekonominya lambat juga mengalami kemerosotan lingkungan, misalnya penggundulan hutan besar-besaran, khususnya

pada wilayah-wilayah yang secara ekologis sensitif serta lereng-lereng yang curam; degradasi lapisan tanah yang tersebar luas; penangkapan ikan berlebihan dan polusi air di zona-zona pesisir; pencemaran air dari bahan-bahan kimia pertanian; dan keracunan pestisida yang dialami petani dan peternak. Namun dari pemantauan Bank Dunia, baik negara yang pertumbuhannya cepat maupun lambat telah mengalami kemajuan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi (Bank Dunia, 1999)

Dapat dijelaskan bahwa baik pertumbuhan ekonomi pesat maupun lambat tidak merupakan sesuatu otomatis dari modal alam (Thomas dan Belt, 1997 dalam Thomas, 2001). Alam selalu dijadikan sasaran eksploitasi besar-besaran yang memungkinkan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, baik untuk kepentingan investasi, pembukaan lahan dan lain sebagainya. Bahkan isu mencuat di media masa tanah air bahwa dengan ijin pemerintah daerah dan DPRD setempat, hutan lindung dapat dijadikan sebagai kebun kelapa sawit dan lahan pertanian lain, alasannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka aplikasi otonomi daerah. Haruskah kita korbakan kelestarian modal alam yang kita miliki demi meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi? Tidakkah ada jalan lain selain alam yang dapat dijadikan target pertama dan utama dalam mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya? Maka pembangunan berkelanjutan adalah solusi tepat menghadapi kegetiran akan kerusakan alam yang terjadi selama ini.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dibalik kebanggaan sebuah bangsa dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan iming-iming mengejar ketertinggalan dengan negara lain justru melahirkan berbagai masalah baru yang semakin rumit dan berkepanjangan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Lebih-lebih masalah degradasi lingkungan yang akhir-akhir ini sangat jelas kita rasakan. Bila kita mengkaji lebih jauh secara psikologis, memang terdapat *trade-off* antara alat pemuas kebutuhan manusia (berupa barang-barang produksi dan jasa-jasa) dengan *amenities* (kenyamanan) dan keterkaitannya dengan hukum kepuasan yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Jaman dahulu orang-orang tua kita begitu mudah menikmati keindahan alam, kesejukan air bersih di sungai-sungai serta keindahan pegunungan yang terbentang luas.

Sesuai dengan hukum kepuasan yang semakin menurun, kepuasan mereka semakin menurun menikmati kenyamanan modal alam, karena sesungguhnya kapasitasnya masih relatif banyak di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, bahkan boleh dibilang sangat banyak. Mereka menganggap bahwa kepuasan yang tertinggi adalah apabila lebih banyak

mengonsumsi barang-barang produksi dan jasa-jasa, karena barang-barang dan jasa-jasa kapasitasnya masih lebih sedikit. Saat ini kita merasakan sulitnya mencari kenyamanan (*amenities*) dan kenikmatan alam, bahkan desa yang merupakan satu-satunya tempat menjadi harapan yang memberikan kesejukan, malah terkontaminasi asap-asap berbahaya akibat kebakaran hutan, peladang-peladang berpindah yang menyisakan kegersangan akibat tanah-tanah tandus yang semakin meresahkan.

Di desa terpencil sekalipun ada sumber-sumber mata air yang jernih, kemungkinan telah dikuasai pengusaha-pengusaha air mineral yang atas ijin Pemda telah mengkapling lokasi tersebut sebagai lahan usaha yang memiliki lisensi, yang bukan lagi hak umum memanfaatkannya. Oleh karena itu, saat ini telah muncul suatu fase meningkatnya tingkat kebutuhan akan kenyamanan, karena eksistensinya sudah sangat sulit di peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari.

Haruskah pembangunan (pertumbuhan ekonomi tinggi) menggeser keberadaan kebutuhan-kebutuhan dasar berupa kenyamanan serta keaslian alam dan menggantikannya dengan lingkungan materialistik dengan berbagai efek dan bentuk kerusakan yang muncul di dalamnya.

Melihat kondisi tersebut, masihkah ada kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini pemerintah, pengusaha dan masyarakat perlu sekali lagi memahami dan merenungi hakekat pembangunan sesungguhnya yang ingin dicapai, yaitu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Maka pengusaha jangan hanya sekedar mengejar target produksi dengan upaya meminimalkan biaya serendah mungkin sedangkan limbah pabrik tidak diurus dan diperhatikan dengan baik, pemerintahpun harus mengontrol secara maksimal, agar limbah-limbah tersebut tidak mencemari lingkungan dan alam sekitar.

Pembangunan janganlah menimbulkan degradasi alam (lingkungan), apa gunanya pembangunan bila lebih banyak menimbulkan eksternalitas negatif dan tentunya lebih merugikan masyarakat serta anak dan cucu kita di masa-masa yang akan datang. Tiga konsep utama pembangunan yang berkelanjutan menurut Mohan Munasinghe adalah memuat: *ekonomi, ekologi, dan kriteria sosial kultural*. Ketiga konsep ini harus berjalan secara sinergis dalam menciptakan pembangunan yang ramah akan lingkungan atau model alam. Masih menurut Mohan Munasinghe, identifikasi

pembangunan berkelanjutan memerlukan (Thomas dan Vinos, 2001):

1. Pemahaman yang baik atas fisik, biologis dan dampak sosial dari aktivitas-aktifitas manusia.
2. Estimasi yang lebih baik atas nilai ekonomi dari kerusakan lingkungan yang akan menolong untuk memperbaiki desain dari kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek, serta mengarahkan pada keputusan-keputusan investasi yang ramah lingkungan.
3. Pengembangan perangkat-perangkat kebijakan dan memperkuat sumber daya manusia dan lembaganya untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang jitu dan mengatur sumber alam dengan cara berkelanjutan

Kebijakan makro ekonomi dan sektoral telah memainkan peranan penting dalam menciptakan kerusakan lingkungan. Kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, program-program pengaturan struktural dan stabilitas pengukuran semua mempunyai efek terhadap basis sumber daya. Seharusnya pemerintah dan pengusaha mencari *win-win solution* dalam mengaitkan suatu kebijakan-kebijakan yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam dengan kemampuan lingkungan dalam menciptakan keseimbangan. Seharusnya ada kontrak sosial antara semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya, ini yang jarang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha kita sebelum melakukan aktifitas produksi di dalam negeri.

Hanya sekedar AMDAL (analisis dampak lingkungan) ternyata belum mampu menciptakan dan meminimalisir dampak industri terhadap lingkungan. Lubang galian sisa pertambangan emas yang cukup luas dan mendalam yang ditinggalkan perusahaan pertambangan, yang terkandung di dalamnya zat-zat kimia berbahaya jelas merusak kondisi tanah setempat. Belum lagi limbah-limbah pabrik yang dibuang ke laut atau sungai, asap-asap pabrik yang mengeluarkan gas-gas berbahaya, merusak lapisan ozon yang berindikasi kepada terciptanya *green house effect* (efek rumah kaca), pabrik-pabrik yang menghasilkan suara yang sangat bising, dan lain-lain. Ini semua harus dicarikan *win-win solution* antara pemerintah dan pengusaha yang dikaitkan dengan kapabilitas lingkungan. Pertanyaan yang ada dibenak kita adalah sampai kapan semua itu dibiarkan? Kebiasaan yang sangat memprihatinkan di negara ini adalah setelah terjadi musibah dan jatuh korban baru pemerintah mengambil tindakan. Tidak ada upaya pencegahan yang lebih komprehensif dan kolektif sebelum terjadi bencana.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Ada beberapa hal yang biasa diterapkan pemerintah Amerika Serikat berkaitan dengan perlindungan lingkungan:

1. **Emission charge of CFC** (penetapan kebijakan pajak terhadap penggunaan *Chloro-Fluro Carbon*). Zat kimia ini biasanya ada pada alat-alat pendingin, seperti: AC, Kulkas dan lain-lain. Penggunaannya dikenakan pajak agar supaya kapasitas CFC berkurang diudara karena zat tersebut diindikasikan sebagai pemicu rusaknya lapisan ozon.
2. **Permit system allowing a fixed amount of emission**, yaitu ijin penetapan kapasitas atau jumlah polusi yang diperbolehkan atau sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan, yang ditujukan kepada pabrik-pabrik yang akan beroperasi.
3. **Subsidy**. Pemerintah memberikan subsidi terhadap industri-industri yang belum menggunakan pengolahan limbah dengan baik, sehingga tidak ada lagi masalah pencemaran lingkungan dan efek lain yang ditimbulkan akibat dari hasil operasional pabrik tersebut. Hal ini sulit diterapkan di dalam negeri karena keterbatasan dana pemerintah, masalah ini diharapkan diupayakan secara personal oleh pihak swasta dalam mengatur dan mengelola limbah-limbah perusahaannya.

Ada beberapa upaya yang seharusnya dilakukan dalam rangka menciptakan kesadaran atau pemahaman guna meminimalisir kondisi rusaknya lingkungan kita, yaitu:

1. Undang-undang yang melarang polusi.

Undang-undang ini harus secara tegas menjelaskan hukuman yang akan di terapkan apabila perusahaan terbukti melakukan pencemaran. Pelaksanaannya harus benar-benar konsisten dan komprehensif serta dijelaskan secara kolektif. Mudah-mudahan cara ini memberikan semacam *warning* yang tegas terhadap pengusaha untuk peduli terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaannya tersebut.

2. Pengenaan pajak pencemaran.

Terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran dikenakan pajak pencemaran, semakin tinggi tingkat pencemaran yang ditimbulkan maka nilai pajaknya akan semakin tinggi pula.

3. Menggunakan sertifikasi.

Pemerintah mengeluarkan sertifikat bebas pencemaran, kalau perlu sistem ini diadakan semacam perlombaan yang menjanjikan hadiah atau kemudahan-kemudahan dari pemerintah untuk pengusaha, sehingga mudah-mudahan memicu pengusaha-pengusaha industri maupun jasa secara sadar dan aktif dalam mengatasi masalah lingkungan.

4. Inforcement dari asosiasi.

Cara ini sedikit memaksa, yaitu lewat asosiasi industri atau organisasi induk industri-industri, guna memberikan penekanan-penekanan agar para anggota dapat menciptakan dan mengembangkan produksi ramah lingkungan.

5. Minyak bumi bebas lead (timbang).

Cara ini telah banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara asia, yaitu BBM bebas timbal. Namun Indonesia masih sangat terbatas pada tempat-tempat tertentu, Hal ini sangat penting mengingat bahaya timbal terhadap lingkungan dan semakin tingginya jumlah kendaraan yang ada di dalam negeri.

6. Media-media komunikasi.

Program ini bertujuan untuk terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan, misalnya dengan memperbanyak iklan-iklan layanan masyarakat yang menarik tentang lingkungan, program-program kemasyarakatan yang dicanangkan pemerintah, dan lain-lain.

7. Tanggung jawab masyarakat setempat.

Masyarakat berperan sangat besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, berawal dari lingkungan pribadi dan di sekelilingnya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan mengawasi upaya-upaya perusakan lingkungan lainnya, akan semakin memperparah kondisi lingkungan yang memang sudah dirasakan parah dari waktu ke waktu.

sampai kesana, berdayakan mereka dengan mutu pendidikan, kesehatan dan terpenuhinya *the basic need* dari masyarakat tersebut. Pertumbuhan ekonomi perlu diupayakan, akan tetapi dengan berbagai perhitungan dan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Adakan kontrak sosial bersama baik pada saat pra-pendirian industri, saat pendirian industri dan saat aktivitas produksi.

Dalam hal ini pengusaha sebagai salah satu pelaku ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional, perlu meningkatkan kesadaran dalam memperhatikan berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari aktivitas produksi usahanya. Biaya jangan hanya ditetapkan sebagai *fixed cost* dan *variable cost* tetapi juga *amenities cost* (biaya kenyamanan) untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mengkonsumsi barang hasil produksinya dalam bentuk pengolahan limbah yang lebih baik dan canggih, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya *market failure* atau kegagalan pasar.

Pemerintah harus tegas memberikan alternatif solusi berupa upaya dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pelaku pencemar, baik dari industri-industri maupun masyarakat setempat, tetap upayakan *win-win solution* dalam menyelesaikan masalah agar penyelesaiannya dirasakan adil oleh semua pihak. Pemberian sanksi tegas terhadap pelaku kerusakan serta adanya penghormatan kepada pihak-pihak yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, menjadi upaya untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan.

Dan akhirnya, masyarakat yang kapasitasnya menjadi objek pembangunan harus mulai memiliki kesadaran dan komitmen bersama, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Karena sesungguhnya peran masyarakatlah yang menjadi penentu sukses atau tidaknya program pelestarian lingkungan tersebut, sehingga semua komponen dapat bersama-sama menikmati pembangunan yang ramah lingkungan, dan itulah pembangunan yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembangunan nasional tidaklah identik dengan pertumbuhan ekonomi semata, pembangunan nasional yang sesungguhnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan kondisi lingkungan yang tetap terjaga. Untuk lebih mensejahterakan masyarakat, awalnya program pemberdayaan sangat diperlukan, karena pemberdayaan akan menciptakan dan melahirkan kesadaran serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Percuma pemerintah menerapkan kebijakan yang muluk-muluk kalau pemahaman dan pola pikir masyarakat belum mampu menyentuh

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2001. *Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. BAPPEDA DKI Jakarta. Download Internet 23 Mei 2007
- Darmawan, A Surya. 2004. *Kesehatan Indonesia yang Selalu Terpinggirkan*. Suara Pembaruan Daily: 27 Agustus 2004
- Field, Barry C dan Martha K. Field. 2006. *Environmental Economics: an introduction*. Singapore: McGraw Hill
- Hatta, Moh. 1994. "Teori Ekonomi dan Politik Ekonomi: Membangun Orde Ekonomi Pancasila" dalam Didik J Rachbini (ed) *Khasanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Keraf, A Sony. *Perlu Tata Dunia Baru yang Lebih Adil*. Suara Pembaruan Daily: Maret 2002
- Prabowo, Diby. 1983. *Kegagalan Pasar*. Yogyakarta: BPFE
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Thomas, Vinos. 2001. *The Quality of Growth*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama